BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan hal yang utama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang pada akhirnya dapat mempengaruhi berbagai bidang di dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa. Maka dari itu pendidikan sangat mempengarauhi seluruh aspek kehidupan suatu negara.

Saat ini jelas terlihat bahwa banyak negara-negara maju memiliki sumber daya manusia yang sangat berkualitas dan mampu mencapai tingkat kehidupan yang dalam perkembangan serta pembangunan negaranya, hal tersebut tentunya dikarenakan sumber daya manusia yang dimilikinya mampu menguasai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai masalah tersendiri yang harus dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan bernegaranya, seperti dalam bidang ekonomi yang hingga kini masih terpuruk, masalah politik, sosial budaya, HAM, serta masalah anak-anak sebagai tunas bangsa yang harus dibekali dengan pendidikan yang layak agar menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi Bangsa Indonesia demi perkembangan pembangunan, sebab dasar pembangunan yang strategis adalah pendidikan. Pendidikan haruslah digunakan untuk mendidik segenap rakyat,

bukan hanya untuk beberapa golongan tertentu saja. Maka tugas negaralah yang harus mengatur hal tersebut untuk proses pencerdasan bangsa.

Sejak adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 para pendiri bangsa ini telah menyadari pentingnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemikiran ini diperkuat dengan kenyataan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menekankan bahwa tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan tuntutan konstitusi dimaksud, Pemerintah berketetapan untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab pada usaha pencerdasan kehidupan bangsa (http://www.depdiknas.go.id/content.php?-content=file_sejarah - Diunduh 04 oktober 2009).

Tantangan terbesar dalam menghadapi pendidikan umum di Indonesia adalah untuk dapat meningkatkan kualitas belajar dan mengajar. Bagaimana cara agar para murid dapat memperoleh dan menyerap ilmu-ilmu yang diberikan para pengajar, serta bagaimana cara agar para murid tidak merasa jenuh / bosan terhadap ilmu pengetahuan.

Kebijakan pembangunan nasional meletakan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Lembaga pendidikan persekolahan merupakan makna strategis bagi peningkatan mutu SDM, dimana guru dan semua komponen masyarakat yang menjadi aktor. Hal tersebut kemudian diperkuat dalam Pasal 4 ayat (6) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan

membudayakan semua komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (http://www.depdiknas.go.id/publikasi/pmptk/pedoman_gvplb2008.swf – Diunduh 02 Desember 2009).

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (http://www.depdiknas.go.id /content.php?content=file_sispen – Diunduh 04 Oktober 2009).

Sekolah dan pendidikan diadakan bagi semua anak dan warga masyarakat sebagai hak yang insani, untuk mempersiapkan mereka menjadi dewasa, mampu mandiri, mengenali identitas sendiri, serta mempunyai tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi. Perolehan pendidikan diharapkan mampu mempertahankan ekstitensinya, sanggup menesuaikan diri di tengah hantaman glombang perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya bangsa.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 33 Propinsi, tentunya di tiap-tiap Propinsinya memiliki masalah pendidikan masing-masing yang harus dihadapi disamping perkembangannya.

Untuk Perkembangan Pendidikan di Jawa Barat secara keseluruhan telah mencapai beberapa kemajuan, mulai dari menurunnya tingkat putus sekolah, meningkatnya angka kelulusan, angka partisipasi, dan angka meneruskan sekolah.

Selain itu perkembangan lainnya dapat dilihat juga dari kenaikan jumlah murid, guru, dan sekolah per tahunnya di tiap-tiap Kabupaten / Kota.

Hal tersebut tidak terlepas dari usaha-usaha yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat yang secara terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Usaha tersebut dituangkan dalam program-program prioritas seprti program pendidikan anak usia dini (PAUD), program percepatan wajib beajar 9 (sembilan) tahun, program pendanaan rehabilitasi sekolah, program manajemen berbasis sekolah (MBS), serta program rintisan wajib belajar 12 (duabelas) tahun.

Selain itu, tidak terlepas juga dari 3 (tiga) pilar kebijakan strategis Nasional, yaitu pertama kebijakan dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kedua kebijakan dalam peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta yang ketiga kebijakan dalam penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik (Interview:Rustiawati-Dinas Pendidikan Jawa Barat).

Berikut ini adalah kulasan tentang jumlah sekolah, murid, dan guru di Propinsi Jawa Barat secara keseluruhan dan 5 Kabupaten / Kota yang diteliti oleh penulis:

Tabel 1.1

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) Propinsi Jawa Barat (2009)

Sekolah		Murid	Guru
Negeri	Swasta		
18.846	861	4.720.566	204.502

Tabel 1.2

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Propinsi Jawa Barat (2009)

Sekolah		Murid	Guru
Negeri	Swasta		
1400	1750	1.493.032	78.645

Tabel 1.3

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) menurut Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Barat (2009)

Kabupaten / Kota	Sekolah		Murid	Guru
	Negeri	Swasta		
Kab. Indramayu	876	11	192.397	8.119
Kab. Subang	878	4	161.027	8.789
Kab. Sukabumi	1158	20	270.434	10/490
Kab. Garut	1502	29	333.469	14.406
Kota Citebon	145	11	38.595	1.950

Tabel 1.4

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Barat tahun (2009)

Kabupaten / Kota	Sekolah		Murid	Guru
	Negeri	Swasta		
Kab. Indramayu	65	78	64.010	3306
Kab. Subang	65	33	56.241	2371
Kab. Sukabumi	79	79	75.758	3799
Kab. Garut	99	76	85.417	6169
Kota Citebon	19	23	17.725	1094

(Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2009:99-103)

Disamping perkembangan tersebut, tentu juga ada masalah-masalah yang dihadapinya oleh Propinsi Jawa Barat. Secara garis besar yang menjadi masalah pendidikannya yaitu diantaranya:

- *Pengelolaan pendidikan bersifat sentralistik*

  Keputusan banyak ditentukan dari pemerintah pusat sehingga sekolah-sekolah di Propinsi Jawa Barat dan masyarakat kurang diberi tempat dalam ikut serta membangun pendidikan. Dalam konteks ini, anak didik condong dijadikan objek belajar yang mengakibatkan terisolasi dari lingkungan fisik dan sosialnya. Selain itu pengelolaan pendidikan menjunjung jiwa uniformitas, sehingga rasa kepemilikan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan menjadi amat rendah.

- *Kurangnya perhatian pada output pendidikan*

  Dalam proses pembelajaran, guru tidak berfokus pada hasil (output) yang harus dicapai, namun hanya sekedar memenuhi target administrative sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis). Hal ini mengakibatkan komponen input dan proses pembelajaran yang dilaksanakan kurang efektif, sehingga hasilnya tidak optimal karena pembangunan kurang terfokus

- *Kurangnya Akses Terhadap Pendidikan Dasar*

  Meskipun angka pendaftaran tinggi, namun ada sekitar 1,9 juta anak antara usia 7 hingga 12 tahun yang tidak bersekolah. Di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sekitar 4,2 juta atau 32% anak usia 13 hingga 15 tahun tidak bersekolah. Sementara 2 juta dari 10 juta anak yang seharusnya

duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) masih berada di Sekolah Dasar (SD) (Wawancara: Kasi Perencanaan-Dinas Pendidikan,tanggal 02 Februari 2010).

Untuk masalah pengelolaan pendidikan yang sentralistik, semua diatur dari pusat, yaitu di Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) - Jakarta (Nurkolis,2006:20). Dalam hal ini pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat terabaikan dalam memberdayakan pembangunan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia disekelilingnya (Musaheri,2007:73).

Birokrasi pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan sangatlah dominan dalam proses pembuatan keputusan, tanpa memperhatikan para guru dan masyarakat sekitar sekolah yang bersangkutan. Hal seperti ini menjadikan lambannya perkembangan pendidikan karena dalam segala hal haruslah atas dasar pertimbangan pusat.

Hal tersebut tidak terlepas dari era Orde Baru, walaupun pada era tersebut ada pengaturan tentang otonomi daerah dalam UU No. 5 tahun 1974 namun segala kebijakan lebih condong kearah sentralistik, karena segala hal diatur oleh pemerintah pusat. Pasca lengsernya Soeharto tahun 1998, terjadi perombakan dalam kebijakan, salah satunya perubahan sistem menjadi kearah desentralisasi yaitu dengan ditandai dengan diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah (Yamin,2009:111).

Didasari hal tersebut, Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) dibawah era reformasi kemudian mulai menerapkan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sebelumnya sudah banyak diterapkan dibeberapa

negara maju seperti di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama *Site-Based Management* (SBM), di Inggris dengan nama *Grant Manintained School* (GMS), di Kanada dengan nama *Schools-Site Decission Making* (SSDM), dan sebagainya (Nurkolis,2006:88-92).

Di Indonesia program ini baru dimulai sejak tahun 1999 sesaat setelah terjadinya krisis ekonomi dan pasca lengsernya era orde baru. Pengembangan program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan model untuk memberdayakan sekolah dasar melalui pelaksanaan Manajemen Sekolah, Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM), dan Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam lingkungan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan.

Di Propinsi Jawa Barat sendiri, program Manajemen Berbasis Sekolah ini dijalankan dalam 2 (dua) fase. Fase pertama dilaksanakan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, dan fase kedua dilaksanakan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mendatang. Semenjak diterapkannya program MBS, perkembangan pendidikan dasar di Jawa Barat mengalami peningkatan (Wawancara:Rustiawati-Dinas Pendidikan).

Secara khusus program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personil pendidikan, anggota komite sekolah & tokoh masyarakat dalam hal Manejemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam urusan pendidikan untuk meningkatkan kinerja sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sekolah dasar. Kegiatan ini berlandaskan asumsi bahwa sekolah akan meningkat mutunya jika kepala sekolah, guru, dan masyarakat termasuk orang tua siswa diberikan

kewenangan yang cukup besar untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah, proses belajar mengajar menjadi aktif dan menarik, para pendidiknya lebih ditingkatkan kemampuannya dan masyarakat sekitar sekolah ikut aktif dalam urusan persekolahan secara umum (http://www.depdiknas.go.id/content.php?-content=file_mbs - Diunduh 04 oktober 2009).

Dalam pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini Departemen Pendidikan melakukan kerjasama dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) (http://www.depdiknas.go.id/content.php?content:file_edupedia&id=20081027134949 - Diunduh 07 Desember 2009).

Dalam penelitian ini yang diteliti oleh penulis adalah kerjasama yang dilakukan DEPDIKNAS dengan UNICEF yang merupakan salah satu organisasi internasional yang khusus membantu anak-anak di dunia yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan kebersihan air & lingkungan.

Pendidikan merupakan masalah yang relatif besar, karena bukan hanya menjadi masalah daerah saja tapi menjadi masalah nasional dan bahkan merupakan masalah internasional. Disinilah UNICEF yang merupakan salah satu organisasi internasional yang khusus membantu anak-anak di dunia mulai masuk dan menawarkan berbagai bantuan dan kerjasama.

Seiring dengan berkembangnya arus global, isu-isu internasional mengalami pergeseran. Aktor-aktor Internasional seperti negara, aktor non-negara, dan organisasi internasional tidak lagi menitikberatkan pada isu-isu politik

dan keamanan saja, akan tetapi bergeser ke isu-isu lainnya seperti ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, para aktor internasional baik itu negara berkembang ataupun negara maju dituntut untuk melakukan kerjasama untuk memenuhi kepentingannya. Dan organisasi internasional merupakan salah satu wadah untuk melakukan kerjasama Internasional tersebut.

UNICEF sebagai organisasi internasional, merupakan aktor non-negara yang merupakan bagian yang cukup penting dalam Hubungan Internasional. Dimana UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat *Low Politic* dan berperan sebagai duta PBB untuk anak-anak di seluruh dunia.

Melihat hal tersebut, Negara Indonesia sebagai negara berkembang telah banyak bergabung dengan berbagai organisasi internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satunya yaitu bergabung dan bekerjasama dengan UNICEF.

UNICEF adalah organisasi yang didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946. Bermarkas besar di Kota New York, UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak di negara-negara berkembang (http://id.wikipedia.org/indonesia/id/unicef - Diunduh 04 Oktober 2009).

UNICEF mulai masuk ke Indonesia pertama kali pada 1948. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. Seiring keberadaan UNICEF di Indonesia, UNICEF mulai

mengembangkan bantuan dan aktifitasnya, bukan hanya sekedar bantuan kemanusiaan. Di Indonesia sendiri UNICEF memeiliki 5 (lima) program, yaitu:

1. Kesehatan dan Gizi

   Dalam menjalankan rogram ini, UNICEF bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, terutama direktorat Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Penyakit Menular. UNICEF memberi bantuan teknis pada program-program pemerintah yang di prioritaskan secara nasional. (http://www.unicef.org/indonesia/id/health_nutrition.html - Diunduh 02 Januari 2010)

2. Perlindungan Anak

   Sebagai lembaga internasional yang dikenal piawai dalam perlindungan anak, program-program UNICEF terfokus pada masalah-masalah pelanggaran, kekerasan, eksploitasi anak dan pencatatan kelahiran.

   Bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, UNICEF merumuskan kebijakan-kebijakan perlindungan anak dan implementasi pengesahan anak secara hukum terutama anak yang tinggal di daerah konflik dan bencana. (http://www.unicef.org/indonesia/id/protection_3146.html - Diunduh 02 Januari 2010).

3. Pendidikan dasar untuk semua

   UNICEF mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dasar melalui sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat. Sistem ini memungkinkan penelusuran semua anak usia di bawah 18 tahun yang tidak bersekolah.

Dalam upayanya mencapai tujuan "Pendidikan untuk Semua" pada 2015, pemerintah Indonesia saat ini menekankan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun bagi seluruh anak Indonesia usia 6 sampai 15 tahun. Dalam hal ini, UNICEF dan UNESCO memberi dukungan teknis dan dana (http://www.unicef.org/indonesia/id/education_3141.html - Diunduh 02 Januari 2010).

4. Memerangi HIV/AIDS

   Program HIV/AIDS bertujuan memberi pendidikan dan pencegahan bagi kaum muda dan masyarakat umum melalui berbagai cara. Misalnya melalui sekolah-sekolah, lembaga-lembaga keagamaan, klub-klub dan kelompok kepemudaan. Target utama pencegahan adalah perempuan dan pasangan mereka. Tujuan utama program UNICEF adalah untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang akan disampaikan melalui advokasi dan penyuluhan. (http://www.unicef.org/indonesia/id/hiv_aids_3154.html - Diunduh 02 Januari 2010).

5. Kebersihan Air & Lingkungan

   UNICEF membantu pemerintah Indonesia untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi perbaikan kondisi air minum dan kebersihan secara nasional. Bantuan juga diberikan kepada pemerintah Indonesia dalam memperbaiki mekanisme perencanaan, sistem pengawasan dan database yang relevan, UNICEF juga memainkan peranan penting sebagai koordinator bidang kebersihan lingkungan dan air pasca bencana tsunami di Aceh dan Sumatra Utara. Membangun kemitraan kerja dengan

mempersatukan segala kemampuan dan sumber daya antar organisasi (http://www.unicef.org/indonesia/id/wes_3161.html - Diunduh 02 Januari 2010).

Dari pemaparan program-program tersebut, dilihat dari program pendidikan UNICEF tersebut yaitu pendidikan dasar untuk semua, sangatlah tepat dengan program pendidikan dasar di Indonesia yang sudah dikampanyekan mulai tahun 1994 yang dikenal dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun untuk melakukan kerjasama disektor pendidikan dasar, salah satunya kerjasama yang dilakukan dalam menjalankan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Pendidikan dasar merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana dalam pendidikan dasar anak-anak belajar mengerti untuk saling menghargai, karena pendidikan dasar merupakan interaksi yang pertama dengan individu-individu (selain keluarga).

Pendidikan dasar di Indonesia adalah selama 9 (sembilan) tahun yang terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yaitu 6 (enam) tahun Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan 3 (tiga) tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) (http://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan_dasar - Diunduh 04 Oktober 2009).

Sejauh ini peranan dalam menangani pendidikan dasar di Jawa Barat yang telah UNICEF lakukan adalah berupa pendanaan, konsultasi, dan bimbingan teknis kepada Dinas Pendidikan Propinsi, Kota / Kabupaten, dan Sekolah-sekolah di Jawa Barat (Wawancara:Education Office-UNICEF).

UNICEF berkarya di 12 kantor wilayah untuk membantu melaksanakan program yang sejauh ini ada di 15 Propinsi di Indonesia yang salah satunya di Propinsi Jawa Barat yang ditempatkan di Ibu Kota Propinsi Jawa Barat, yaitu Bandung (http://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html - Diunduh 04 Oktober 2009).

Dari seluruh pemaparan-pemaparan tersebut penulis menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia harus dapat menjadi tolak ukur dalam peningkatan sumber daya manusia. Disisi lainnya, nampak ada program-program yang dilaksanakan UNICEF bagi negara-negara berkembang yang salah satunya berkaitan dengan pendidikan. Dari kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia, UNICEF masuk sampai ke Propinsi-Propinsi di Indonesia, salah satunya di Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan latar belakang inilah, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang peranan UNICEF dalam bantuan penanganan masalah pendidikan dasar di Propinsi Jawa Barat. Dan judul yang diangkat peneliti adalah:

"Peranan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Dalam Penanganan Masalah Pendidikan Dasar di Jawa Barat (Studi Program DEPDIKNAS: Manajemen Berbasis Sekolah)"

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah pada program studi ilmu hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Yaitu:

1. Pengantar hubungan internasional

   Pada mata kuliah ini diperkenalkan tentang studi ilmu hubungan internasional sebagai suatu bidang studi pembelajaran, sejarah perkembangan, serta para aktor yang terlibat di dalamnya.

2. Organisasi dan administrasi internasional

   Membahas sejauhmana peran suatu aktor ilmu hubungan internasional Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana peranan Organisasi Internasional.

3. Informasi dan Komunikasi Internasional

   Membahas langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan kerjasama internasional yang tentunya harus ada komunikasi yang terarah antara pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional, yaitu UNICEF.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Melihat fenomena tersebut, penulis merumuskan Identifikasi Masalah sebagai berikut:

1. Bantuan apa saja yang diberikan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam mensukseskan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Jawa Barat?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penerapan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Jawa Barat?

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam membatu mengatasi kendala dalam penerapan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Jawa Barat?
4. Bagaimanakah keberhasilan penerapan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Jawa Barat?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini berupaya untuk menentukan batas-batas permasalahannya dengan jelas yang memungkinkan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup permasalahan. Sebagai variabel dependen, penelitian ini akan memusatkan pada peranan UNICEF. Sedangkan untuk variabel independen yang dipilih adalah upaya penanganan masalah Pendidikan dasar di Jawa Barat.

Peneliti menganggap bahwa UNICEF sangat tepat untuk menjadi aktor utama, karena merupakan organisasi internasional yang fokus terhadap masalah anak-anak dan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis meneliti peranan UNICEF dalam penanganan masalah pendidikan dasar di Jawa Barat melalui program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Peneliti juga membatasi waktu penelitian dari tahun 2006 sampai 2010, dengan alasan di tahun 2006 merupakan awal kerangka kerjasama tahap kedua antara Pemerintah Indonesia dengan UNICEF dan tahun 2010 merupakan batas akhir kerangka kerjasama tahap kedua antara Pemerintah Indonesia dengan

UNICEF (DEPDIKNAS,2006:16). Pembatasan waktu dilakukan untuk menghindari luasnya rentang waktu yang diteliti sehingga mempermudah penelitian.

Selain itu, yang penulis teliti di Jawa Barat adalah 5 Kabupaten / Kota antara lain Garut, Sukabumi, Cirebon, Indramayu, dan Tasikmalaya. Dengan alasan dalam membantu program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Jawa Barat, UNICEF hanya membantu secara langsung di lima Kabupaten / Kota tersebut.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas maka diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana Peranan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam Penanganan Masalah Pendidikan Dasar di Jawa Barat Melalui Program Manajemen Berbasis Sekolah"

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bantuan yang diberikan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam mensukseskan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Jawa Barat
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam membantu mengatasi kendala dalam penerapan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui keberhasilan dalam penerapan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Jawa Barat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah hasil yang ada dapat dipergunakan sebagai bahan masukan atau referensi serta sebagai tambahan informasi dan pembelajaran untuk memperluas wawasan para penstudi tentang hal-hal yang menyangkut studi hubungan internasional.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Mengetahui peranan organisasi internasional dalam membantu meringankan masalah yang dihadapi negara anggotanya.
2. Melatih penulis untuk membuat karya ilmiah yang lebih baik lagi.
3. Mendorong peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional.

1.4.1 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor

suatu negara dengan negara lainnya. Pada kenyataannya Hubungan Internasional tidak terbatas hanya pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dengan kelompok kepentingan, sehingga negara tidak selalu sebagai aktor utama tetapi merupakan aktor yang rasional yang dapat melakukan hubungan melewati batas negara.

Mc.Clelland mendefinisikan hubungan internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Mc.Clelland dalam Perwita & Yani, 2005:4).

> Hubungan Internasional adalah interaksi aktor-aktor yang tindakan dan kondisinya memiliki kosekuensi penting terhadap aktor lain diluar jurisdiksi efektif unit politiknya (Steve Chan dalam Perwita dan Yani, 2005: 7). Dari definisi diatas terkaji bahwa negara bangsa dapat dipandang sebagai pelaku utama dari Hubungan Internasional. Hal itu karena yang melakukan tindakan dan dampak dari tindakan itu adalah unit politik walaupun tidak tertutup kemungkinan yang melakukan tindakan itu adalah aktor-aktor non-negara (Perwita & Yani, 2005:7).

Menurut Perwita dan Yani, hubungan internasional dalam arti umum diartikan sebagai berikut:

> Hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur-unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, social, budaya, hankam, dan sebagainya. Disamping Negara ada juga pelaku internasional, transnasional, atau supranasional yang lain seperti *Perserikatan Bangsa-Bangsa* (PBB), *Uni Eropa* (UE), *Multi Nasional Coporation* (MNC), *Lembaga Swadaya Masyarakat* (LSM), *Inter-governmental Organizations* (IGOs), *Inter Non-Governmental Organizations* (INGOs) dan sebagainya. Terjadinya hubungan intrnasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleknya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005:1-3).

Hubungan internasional merupakan hubungan semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, hal ini dapat ditunjukkan bahwa terdapat 12 substansi yang mewakili hubungan internasional yaitu bangsa dan dunia, proses transnasional dan interdependensi internasional, perang dan damai, kekuatan dan kelemahan, politik internasional dan masyarakat internasional, kependudukan versus pangan serta sumber daya alam dan lingkungan, kemakmuran dan kemiskinan, kebebasan dan penindasan persepsi dan ilusi, aktivitas dan antipati, revolusi dan stabilitas, identitas dan transformasi (Mas'oed, 1994:29).

Dalam bukunya Pengantar Hubungan Internasional, Suwardi Wiriatmadja menjelaskan tentang arti hubungan internasional bahwa:

> "Hubungan internasional lebih kepada untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berpikir dari manusia" (1967:36).

Pengkajian hubungan internasional termasuk di dalamnya pengkajian terhadap aktor-aktor hubungan internasional dan kaitannya dengan berbagai kerjasama yang dilakukan dalam sebuah wadah, yaitu organisasi internasional yang merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional.

Ketika kita membicarakan pola hubungan kerjasama internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa negara membutuhkan alat yang diperlukan dalam rangka kerjasama dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan dan memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul yaitu

organisasi internasional. Berkaitan dengan organisasi internasional, telah banyak definisi mengenai salah satu aktor hubungan internasional ini.

> Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005:34).

Dari pemaparan tersebut, maka jelaslah bahwa dalam penelitian ini Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan salah satu organisasi internasioal, yaitu UNICEF tentunya terdapat kepentingan masing-masing di dalamnya. Dan UNICEF adalah salah satu organisasi internasional yang merupakan sarana dalam melakukan kerjasama internasional dan sarana untuk mendapatkan kepentingan nasional pemerintah Indonesia.

Sedangkan menurut Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional, dijelaskan pengertian kerjasama internasional yang dapat dipahami sebagai:

> Kerjasama dalam masyarakat internasional suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdepedensia dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat ionternasional. Kerjasama internasional terjadi karena *national understanding* serta mempunyai arah tujuan sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasionalyang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik (1997:20).

Berbicara tentang organisasi internasional yang memiliki sistem tersendiri dalam melaksanakan kegiatannya agar dapat mencapai tujuan yang di inginkan yang tentunya sangat berhubungan dengan pemberian bantuan dan kerjasama dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak terkait.

Dalam memberikan definisi organisasi internasional, perlu juga diperhatikan makna dari dua kata, yaitu internasional dan organisasi, Clive Archer dalam bukunya *International Organizations* mencoba meberikan penjelasan mengenai organisasi internasional dengan melihat arti dari tiap-tiap kalimat.

> Organisasi internasional berasal dari dua kata yaitu organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna, *pertama, intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antarwakil resmi dari negara – negara yang berdaulat. *Kedua*, aktivitas antar individu – individu dan kelompok – kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan transnasional. *Ketiga,* hubungan antara suatu cabang pemerintahan disuatu negara (seperti : departeman pertahanan) dengan suatu cabang pemerintahan di suatu negara lain (seperti : badan pertahana atau badan intelegen) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental.* Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubngan internasional (Perwita & Yani, 2005:92-93).

T. May Rudi memberikan definisi tersendiri mengenai organisasi internasional beserta dengan unsur-unsurnya.

> Organisasi internasional secara sederhana dapat didefinisiskan sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara – negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi – fungsi yang meMBSri manfaat timbal – balik yang diejahwantahakan melalui pertmuan – pertemuan serta kegiatan – kegitana staf secara berkala (Cheever & Haviland dalam Rudy, 2009:2).
> Organisasi internasional juga diartikan sebagai pola kerjasama yang melintas batas – batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta disepekati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.
>
> Secara sederhana Organisasi internasional terdiri dari unsur – unsur :
>
> 1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintas batas negara.
> 2. Mencapai tujuan – tujuan yang disepakati bersama.
> 3. Baik antarpemerintah atau non-pemerintahan.
> 4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
> 5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (2009:2-4).

Selain itu menurut Bennet organisasi internasional dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah (*inter-Governmental Organizations / IGO*), anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.
2. Organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations / NGO*), terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya (Bennet dalam Perwita dan Yani, 2005:93-94).

Dari penggolongan organisasi internasional tersebut, UNICEF merupakan Organisasi antar pemerintah (*inter-Governmental Organizations* / IGO), karena beranggotakan pemerintah atau instansi-instansi pemerintah yang mewakli pemerintah suatu negara secara resmi. Dalam penelitian ini UNICEF bekerjasama dengan instansi pemerintah di Indonesia yaitu Departemen Pendidikan Nasional dalam menangani masalah pendidikan.

Adapun fungsi dari organisasi internasional menurut Peter Toma dan Robert F. Gorman, yaitu meliputi:

1. Saluran untuk kontak diplomatic secara berkesinambungan.
2. Pencegahan dan pengendalian konflik antar-negara anggota.
3. Fasilitas bagi interaksi ekonomi antar-negara anggota (Rudy, 2000:29-30).

Sedangkan menurut Michael Haas, fungsi organisasi internasional yaitu:

1. Fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan.
2. Fungsi sosialisasi.
3. Fungsi rekrutmen.
4. Fungsi transaksi.
5. Funsi pembuatan aturan; a) prosedral; b) substansial.
6. Fungsi penerapan aturan.
7. Fungsi pengawasan aturan (Rudy, 2009:30).

Dari hal tersebut, bisa tergambarkan bahwa UNICEF merupakan organisasi internasional yang bersifat fungsional. Fungsi dan peran UNICEF lebih

dititik beratkan pada penanganan masalah sosial yang menyangkut masalah kesejahteraan anak-anak. Di bawah UNICEF, ada UNICEF Indonesia yang terdapat berbagai unit yang bertugas menangani masalah-masalah seperti kesehatan, air bersih, perlindugan anak, pendidikan dasar, dan sebagainya.

Jika berbicara tentang organisasi internasional, tentunya ada peranan-peranan yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut.

> Setiap organisasi internasional tentunya dibentuk untuk melaksanakan peran-peran dan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya. Peran organisasi internasional adalah sebagai berikut: 1) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota); 2) Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan; 3) Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, peace keeping operation dan lain-lain) (Perwita & Yani, 2005:27).

Sedangkan menurut Clive Archer paling tidak ada 3 (tiga) peranan yang secara umum dimiliki oleh organisasi internasional, antara lain yaitu ;

1. Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara – negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota – anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah – masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah – masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan – keputusan sendiri tanpa dipengaruhi olleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Archer, 1983:130-147).

Dalam penelitian ini pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan UNICEF dalam bidang pendidikan, dimana UNICEF menjadi sebuah wadah untuk menggalang kerjasama dan memiliki peranan tersendiri dalam memberikan

berbagai bantuan terhadap pendidikan di Indonesia yang bisa memberikan konstribusi yang berarti bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu bantuannya yaitu melakukan kerjasama dengan DEPDIKNAS dalam program *Manajemen Berasis Sekolah* (MBS).

Pada prosesnya, permasalahan pendidikan merupakan pergeseran dari isu nasional yang berkembang menjadi isu global. Dapat dipaparkan bahwa isu global merupakan permasalahan dan tantangan yang secara berkaitan dengan unsur-unsur atau keperluan dasar akan perkembangan dan kemajuan internasional. Permasalahan pendidikan merupakan permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan hal yang utama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang pada akhirnya dapat mempengaruhi berbagai bidang di dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa (Tirtahardja, 2005:9).

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembangunan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Selain dari pada itu, banyak juga para pakar pendidikan yang mendefinisikan pendidikan, salah satunya yang di kemukakan oleh Moh. Yamin bahwa:

> Pendidikan adalah media mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini pada era *aufklarung* (Pencerahan). Pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan bernegara (2009:15).

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oleh karena itu, pendidikan haruslah mampu menjawab persoalan-persoalan yang berada di tengah masyarakat (Gunawan, 2000:54).

Program *Manajemen Berbasis Sekolah* (MBS) adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam hal ini ditanganai oleh DEPDIKNAS yang dijalankan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang merkualitas (Hadiyanto, 2004:63).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan *personil pendidikan, anggota komite sekolah & tokoh masyarakat* dalam mengelola sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan ini berlandaskan asumsi bahwa sekolah akan meningkat mutunya jika kepala sekolah, guru, dan masyarakat termasuk orang tua siswa diberikan kewenangan yang cukup besar untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah, proses belajar mengajar menjadi aktif dan menarik, para pendidiknya lebih ditingkatkan kemampuannya dan masyarakat sekitar sekolah ikut aktif dalam urusan persekolahan secara umum (http://www.depdiknas.go.id/content.php?-content=file_mbs - Diunduh 04 oktober 2009).

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 secara tegas sudah menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan sistem pendidikan

harus menggunakan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini menunjukkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan strategi yang harus digunakan oleh semua sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan (http://www.depdiknas.go.id/undang-undang_pendidikan&id - Diunduh 04 oktober 2009).

Pengembangan program ini secara garis besar dijalankan melalui pengembangan model untuk memberdayakan pendidikan dasar melalui Manajemen Sekolah; pelaksanaan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM); dan Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam lingkungan sekolah.

Dalam menjalakan program MBS ini, Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS), melakukan kerjasama dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) (http://www.depdiknas.go.id/content.php?content:file_ edupedia&id= 20081027134949 - Diunduh 07 Desember 2009).

UNICEF merupakan sebuah organisasi internasional yang tentunya mempunyai peranan tersendiri dalam keberadaannya. Di Indonesia, UNICEF berperan sebagai instrument yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggalang berbagai kerjasama. Selain itu, UNICEF juga berperan sebagai aktor independen yang dalam berbagai kebijakan yang diambilnya merupakan kebijakan yang tanpa pengaruh dari kepentingan-kepentingan pihak lain (Wawancara:Education Office-UNICEF).

Dari berbagai kerjasama yang dilakukan, salah satunya adalah kerjasama dibidang pendidikan. UNICEF memiliki program pendidikan dasar untuk semua / *Educations For All* (EFA). Dalam hal ini UNICEF mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dasar melalui sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat. Sistem ini memungkinkan penelusuran semua anak usia di bawah 18 tahun yang tidak bersekolah (http://www.unicef.org/indonesia/id/education_3141.html - Diunduh 02 Januari 2010).

Selain itu, UNICEF juga membantu pemerintah yang dalam hal ini DEPDIKNAS dalam menjalankan program-program unggulan pendidikannya, salah satunya UNICEF membantu pemerintah Indonesia dalam menjalankan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam program MBS ini, UNICEF berkarya di sebanyak 12 Propinsi yang salah satunya di Propinsi Jawa Barat.

Dalam kerjasamanya membantu menerapkan program MBS di Jawa Barat, UNICEF memberikan bantuan berupa bimbingan teknis, pendanaan, dan konsultasi kepada Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kota / Kabupaten, dan Sekolah-sekolah di Jawa Barat yang ditangani oleh UNICEF (Wawancara:Education Office-UNICEF).

1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan uraian diatas, maka hipotesis didalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

"*United Nations Children's Fund* (UNICEF) berperan dengan pemberian bantuan teknis dan pendanaan dalam penanganan masalah pendidikan dasar di Jawa Barat melalui program *Manajemen Berbasis Sekolah* (MBS)"

1.4.3 Definisi Operasional

Untuk dapat memahami dan mengukur variable-variabel yang terdapat dalam hipotesis maka variabel-variabel tersebut akan didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

- Peranan UNICEF memiliki tujuan untuk membantu Indonesia dan memperbaiki prosesnya untuk penyelesaian masalah Pendidikan Dasar agar dapat mencapai tujuannya dan meningkatkan kualitas dan keefektifan keseluruhannya.
- *United Nations Children's Fund* (UNICEF) adalah organisasi internasional yang berada dibawah naungan PBB. Berdasarkan struktur organisasi dan fungsinya, UNICEF lebih memfokuskan pada penanganan masalah yang berhubungan dengan anak-anak.
- Pendidikan dasar adalah pendidikan yang paling awal dijankan oleh anak-anak. Di Indonesia pendidikan dasar adalah selama 9 (sembilan) tahun yang terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yaitu 6 (enam) tahun Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Iftidaiyah (MI), dan 3 (tiga) tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs).

- Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah salah satu program yang dikeluarkan oleh DEPDIKNAS atas kerjasama dengan UNICEF dan UNESCO untuk menangani peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

  Menurut Wohlstetter dan Mohrman, secara luas MBS berarti:

  "Pendekatan politis yang mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat local guna memejukan sekolahnya. Partisipan local tersebut adalah kepala sekolah, guru, orang tua siswa, siswa, dan masyarakat sekitar." (Wohlstetter & Mohrman dalam Nurkolis,2006:2-3).

- Jawa Barat adalah salah satu Propinsi di Indonesia, yang terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota, dan Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Jawa Barat merupakan Propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

1.5 Metodelogi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.

1.5.1 Metodologi Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Deskriptif (Descriptive Research),

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunaan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu;

1. *Studi kepustakaan*, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi

berdasarkan literature atau referensi, yang didapat dari berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, surat kabar, artikel, jurnal dan fasilitas situs internet yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. *Teknik wawancara*, yaitu dengan mendapatkan sejumlah keterangan dan fakta secara akurat yang diperoleh langsung secara lisan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Jalan Dipati Ukur 116 Bandung.
2. Perpustakaan Pusat FISIP Universitas Parahyangan (UNPAR), Jalan Cimbuleuit - Bandung.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Jatinangor – Sumedang.
4. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan (UNPAS), Jalan Lengkong – Bandung.
5. Kantor pusat UNICEF Indonesia, Wisma Metropolitan II, Jl Jend Soedirman kavling 31 – Jakarta.
6. Kantor cabang UNICEF untuk wilayah Jawa Barat, Jalan Salam No 86 – Bandung
7. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Jalan DR Radjiman No. 6 Bandung

8. Badan Pusat Statistik (BPS) JABAR, Jalan Purwakarta No. 169 / 173, Antapani - Bandung

1.6.2 Waktu Penelitian

TABEL 1.5
WAKTU PENELITIAN

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian											
		Tahun 2009				Tahun 2010							
		Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust
1	Pengajuan Judul												
2	ACC Judul												
3	Bimbingan												
4	Seminar UP												
5	Penelitian												
6	Sidang Skripsi												

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian, secara sistematis penulisan ini ditulis sebagai berikut;

Bab I, Pendahuluan sesuai dengan isi penelitian, yang membahas dasar-dasar atau latar belakang dari dibuatnya penelitian ini, terdiri dari: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kerangka Pemikiran,

Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, serta Lokasi dan Lama Penelitian.

`Bab II, Tinjauan Pustaka, merupakan hasil telusuran tentang kepusatakaan yang mengupas topik penelitan yang sama, hal ini merupakan bukti pendukung bahwa topik atau materi yang diteliti memang suatu permasalahan yang penting, sebagaimana ditunjukan oleh kepustakaan yang dirujuk. Teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini, yaitu: Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional, dan Organisasi Internasional.

Bab III, Objek Penelitian, yang memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian, khususnya keadaan objek penelitian dihubungkan dengan judul skripsi atau permasalahan yang diteliti. Objek Penelitian ini menyangkut masalah Variabel Bebas dan Variabel terikat, yang akan membahas: Peranan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam Penanganan Masalah pendidikan dasar di Jawa Barat.

Bab IV, Analisis hasil penelitian dan interpretasi, yang mencerminkan hubungan antara dua variabel (bebas dan terikat) yang diangkat dalam penelitian. Yaitu membahas Peranan *United* UNICEF dalam Penanganan Masalah pendidikan dasar di Jawa Barat.

Bab V, Dalam bab ini akan ditarik sebuah kesimpulan yang akan mendukung hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.